

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Ponorogo memiliki kekayaan potensi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata. Di bidang kebudayaan Kabupaten Ponorogo memiliki kebudayaan berupa seni reyog Ponorogo dan beberapa event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya, gelar budaya setiap dua bulan sekali di telaga ngebel, event hari jadi kabupaten Ponorogo dan festival reyog mini . Di bidang pariwisata Kabupaten Ponorogo memiliki potensi alam, wisata budaya dan wisata minat khusus yang sangat potensi untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan bidang pariwisata khususnya dan pembangunan ekonomi kabupaten Ponorogo pada umumnya.

Mengacu pada rencana induk pengembangan pariwisata Ponorogo maka wilayah bagian timur Kabupaten Ponorogo yaitu Kecamatan Ngebel, Pudak, Sooko adalah termasuk dalam wilayah pengembangan pariwisata kaki Gunung Wilis, oleh karena itu berdasarkan beberapa hal tersebut diatas dan dibarengi dengan potensi pariwisata yang besar yang dimiliki Kabupaten Ponorogo di wilayah kaki Gunung Wilis yaitu diantaranya adalah Telaga Ngebel, Air Terjun Toyomerto, Sumber Air Panas di wilayah Kecamatan Ngebel, Air Terjun Pletuk di kecamatan Pudak dan kompleks Sendang Waloyo Jatiningsih.

Wisata religi Patung Bunda Maria Fatima di Klepu kecamatan Sooko, Masjid Tegal Sari, Pondok Modern Gontor, Makam Bathoro Katong dan masih

banyak lagi. Dapat disimpulkan bahwa wilayah bagian timur kabupaten Ponorogo sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah pengembangan wisata.

Dengan modal keunggulan potensi wisata yang berkualitas dan melalui pembangunan yang dilakukan secara berwawasan budaya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diharapkan Kabupaten Ponorogo dimasa datang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat mampu mewujudkan visi pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga Kabupaten Ponorogo yaitu mewujudkan Kabupaten Ponorogo menjadi daerah wisata unggulan di Jawa Timur.

Pendapatan asli daerah menunjukkan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya, semakin mampu suatu daerah mengelola sumberdaya yang dimiliki semakin tinggi pendapatan yang diperoleh daerah tersebut begitu pula sebaliknya. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber modal untuk melaksanakan suatu program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan belanja kebutuhan daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari berbagai sektor pariwisata. Pendapatan tersebut berasal baik dari pajak serta restribusi daerah.

Potensi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo selama dua tahun terakhir secara terperinci sebagai berikut:

Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2014

Menurut laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan SKPD (SPJ pendapatan – fungsional) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 belum bisa melampaui target. Yang mana target atau jumlah anggaran awal yaitu Rp 573.000.000,- dan hanya menerima

anggaran yang disetor sebesar Rp 500.246.000,-. Dan untuk tahun 2014 sampai bulan oktober pendapatan asli daerah pada sektor wisata mengalami kenaikan . dari yang ditargetkan sebesar Rp 666.500.000,- memperoleh Rp 676.500.000,- , yang mana adanya pelampauan target sebesar Rp 9.637.000,- . Dengan demikian untuk tahun mendatang diharapkan semakin meningkat lagi.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 2 Tahun 2015).

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.2 Tahun 2015 Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Pajak Daerah,

- b) Retribusi Daerah,
 - c) Hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan,
 - d) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer dan,
 3. Lain-lain dan pendapatan asli Daerah yang sah.

Pembangunan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang pemuda dan olah raga diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian Kabupaten Ponorogo yaitu terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada khususnya dan terhadap ekonomi masyarakat Ponorogo pada umumnya. Sehubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan kinerja organisasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sangat penting dalam pengembangan potensi kebudayaan Ponorogo, wisata alam, dan religi. Yang mana dalam bidang-bidang tersebut mampu memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian Kabupaten Ponorogo terhadap pendapatan asli daerah pada khususnya dan terhadap perekonomian masyarakat Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Wisata “.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah di definisikan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Dinas Budparpora dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor wisata ?
2. Bagaimanakah hasil dari evaluasi kinerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor wisata ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui hasil dari kinerja Dinas Budparpora dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor wisata.
2. Mengetahui hasil evaluasi kinerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor wisata

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dari hasil sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor wisata Ponorogo diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan dapat berguna untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam memahami fenomena yang berkembang, khususnya mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor wisata , yang terjadi dalam masyarakat dan dengan temuan yang ada diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah pada sektor wisata di Kabupaten Ponorogo.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan dan tentunya bermanfaat bagi Dinas pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Dinas terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah Ponorogo dalam sektor wisata .Serta untuk meningkatkan kualitas dan mutu sehingga bisa dijadikan bahan acuan formulasi kebijakan yang akan datang demi terwujudnya suatu formulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah

menafsirkan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain :

1. Evaluasi adalah

Dunn, William N. (2000:608) mengemukakan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

2. Kinerja adalah

Joko Widodo (2005:78) definisi kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Kinerja sebagai kata bendamengandung arti” thing done “(suatu hasil yang telah dikerjakan).

Menurut Suyadi Prawirosentono (1999:2) definisi kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang / sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

3. Dinas Pariwisata Kabupaten

Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga Kabupaten Ponorogo yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 tahun 2008 Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah kabupaten Ponorogo dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo.

4. Peningkatan

Menurut seorang ahli bernama Adi S, Peningkatan merupakan upaya menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan ketrampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya

5. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

6. Wisata

Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang KEPARIWISATAAN)

F. LANDASAN TEORI

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul diperlukan adanya jawaban atas penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi, jawaban tersebut dapat diperoleh dari suatu teori yang mendasari dari persoalan tersebut. Teori itu akan menjembatani antara konsep-konsep yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1. Pendapatan asli daerah

Menurut Undang-Undang RI no 2 tahun 2015 adalah PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari wilayah daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

a) Pajak Daerah

Davey (1988:39) merumuskan pajak daerah adalah

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah dan tarifnya adalah sebagai berikut,

1. Jenis pajak daerah yang dipungut provinsi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air (PKB-KAA) dengan tariff 5%
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB-KAA) dengan tarif 10%
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tariff 5%
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tariff 20 %

Demi rasa keadilan dan asas pemerataan maka undang-undang mengatur bagi hasil pajak dan realokasi pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten /kota. Pajak provinsi yang bersumber dari PKB-KAA dan BBNKB-KAA, P3ABT dan AP sebagian diserahkan kepada kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut,

- a) Minimum 30% dari penerimaan PKB-KAA dan BBN-KAA
- b) Minimum 70% dari penerimaan PBB-KB
- c) Minimum 70% dari penerimaan P3ABT dan AP

Pengalihan pajak bagian penerimaan pajak daerah provinsi tersebut lebih lanjut diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antara daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan penggunaan bagian daerah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan oleh daerah itu sendiri.

Penerimaan pajak kabupaten juga harus dialokasikan minimum 10% untuk kepentingan desa. Pengaturan mengenai alokasi pajak tersebut didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa yang bersangkutan.

Penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu, gubernur mengambil kebijakan untuk membagikan sebagian hasil penerimaan pajak tersebut kepada kabupaten/kota lainnya.

2. Jenis pajak daerah yang dipungut Kabupaten/Kota:

- a) Pajak hotel dengan tarif 10%
 - b) Pajak restoran dengan tarif 10%
 - c) Pajak hiburan dengan tarif 35%
 - d) Pajak reklame dengan tarif 25%
 - e) Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%
 - f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tarif 20%
 - g) Pajak parkir dengan tarif 20%
- b) Retribusi

Menurut UU No.23 tahun 2014 ristribusi adalah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah:

- a) Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - 1. Retribusi Jasa Umum
 - 2. Retribusi Jasa Usaha
 - 3. Retribusi Perizinan
- b) Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukan pada desa.

Pendapatannya diatur dengan Perda Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

c) Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Lainnya

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan/ rekreasi, vila, pesanggrahan, dan lain-lain keyntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

d) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Kondisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Undang-undang No. 25/1999 juga mendukung keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari wilayah daerah itu sendiri. Adapun UU yang berkaitan dengan pendapatan daerah adalah UU No. 34/2000 (penganti UU No. 18/1997). Berdasarkan UU No. 34/2000 ini penerimaan yang diperoleh kabupaten

adalah pajak-pajak: hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, penggalan bahan galian C dan pajak parker. Sedangkan pajak yang menjadi wewenang propinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan manfaat air bawah tanah dan air permukaan.

Bagi daerah PAD ini jelas sumber dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Jika dibandingkan pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari daerah dengan PAD yang diperoleh daerah, sebenarnya sumber PAD ini kecil-kecil. Namun semangat untuk meningkatkan PAD sangat terasa sekali di hampir sebagian daerah. Persoalan yang timbul adalah bahwa upaya untuk meningkatkan PAD ini cenderung menimbulkan citra yang kurang baik bagi dunia usaha karena seringkali menjadi beban pengusaha, sehingga dapat mengganggu kelangsungan investasi di daerah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan

- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas Penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Widayat (1995) dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
- b. Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjangkau wajib pajak baru melalui pendaatan dan pendaftaran atau menggali pajak baru

2. Evaluasi Kinerja

Menurut Joko Widodo (2005:94) evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Dunn, William N.(2000:608) mengemukakan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk

pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Hasil penilaian terhadap kinerja organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria seperti yang disampaikan oleh Timple, A. Dale (1999: 397-398), yaitu:

- 1) Kategori Buruk

Yaitu menunjukkan bahwa kondisi kinerja berada di bawah harapan dan sasaran minimum, yang diperlihatkan dengan membandingkan hasil-hasil yang dicapai selama masa penilaian dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kinerja memperlihatkan hasil-hasil yang terbatas dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan. Terdapat

upaya perbaikan hasil-hasil kerja untuk meningkatkan kinerja hingga ke tingkat yang cukup.

2) Kategori Sedang

Dalam tahapan ini kinerja memenuhi sebagian besar harapan kerja minimum yang ditentukan. Terdapat pengambilan tindakan mandiri tetapi biasanya masih bergantung pada pengawas (atasan).

3) Kategori Baik

Kinerja memuaskan, Kinerja telah memenuhi persyaratan esensial serta mencapai hasil yang dianggap beralasan dan dapat dicapai dengan masa kerja, pengalaman serta pelatihan. Kinerja cukup membandingkan antara hasil-hasil yang dicapai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu. Umumnya dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah-masalah dan mencari bantuan yang diperlukan untuk mengambil tindakan korektif.

4) Kategori Sangat baik

Kinerja di atas normal. Pencapaian serta hasil telah berada di atas harapan. Telah memperlihatkan kemampuan untuk mencapai hasil yang melampaui dalam banyak bidang yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

5) Kategori Baik sekali

Kinerja luar biasa disemua aspek. Biasanya melampaui harapan-harapan yang ditentukan untuk semua sasaran. Prestasi dan hasil kerja sangat tinggi dan semua tanda menunjukkan bahwa tingkat kinerja akan tetap tinggi selama beberapa waktu. Kinerja mendekati yang paling baik yang dapat diharapkan pada pekerjaan ini pada waktu ini. Bahkan menangani masalah masalah/situasi situasi yang paling sulit hanya dengan bimbingan sekali-kali.

**3. Tupoksi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Ponorogo**

Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikaan pembinaan administrasi di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga.
- 2) Seketariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, adminstrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

Fungsi sekretariat yaitu :

- a) Pengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative
 - b) Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
 - c) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan Dinas
 - d) Penyelenggaraan protokoler, humas, dan perjalanan Dinas
 - e) Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas
 - f) Penghimpunan dan penyusunan informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas
 - g) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas
 - h) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Bidang kebudayaan mempunyai tugas mengumulkan bahan pembinaan, pemantauan, pelaksanaan perizinan dan koordinasi di bidang kebudayaan.

Fungsi penyelenggaraan di bidang kebudayaan:

- a) Pelaksanaan pendapataan kegiatan kesenian, sejarah, nilai tradisional, museum dan purbakala

- b) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk memajukan kesenian serta melestarikan sejarah, nilai tradisional, museum dan benda-benda kepurbakalaan
 - c) Pelaksanaan perizinan di bidang seni budaya.
 - d) Pelaksanaan pembantuan terhadap kegiatan seni budaya
 - e) Penyaluran subsidi atau bantuan kepada kegiatan kesenian, sejarah nilai tradisional museum kepurbakalaan serta memantau pelaksanaan dan pemanfaatannya
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Bidang pengembangan pariwisata mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata, serta pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata.

Fungsi bidang pengembangan pariwisata :

- a) Pembinaan dan pengembangan pengusaha obyek dan daya tarik wisata, atraksi, dan hiburan wisata.
- b) Pelaksanaan perizinan dibidang pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata.
- c) Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, atraksi dan hiburan wisata

- d) Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan pariwisata
 - e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pariwisata
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Bidang Jasa dan Sarana Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan, melaksanakan pengembangan usaha jasa dan sarana wisata serta usaha dibidang makanan dan minuman, hotel/penginapan dan bar yang mendukung pariwisata.

Fungsi bidang jasa dan sarana wisata yaitu:

- a) Pembinaan dan pengembangan usaha jasa dan sarana wisata serta usaha dibidang rumah makan, minum, hotel/penginapan dan bar yang mendukung pariwisata
- b) Pelaksanaan perizinan di bidang perusahaan akomodasi, jasa angkutan wisata, usaha di bidang rumah makan, catering, minuman, hotel/penginapan dan bar yang mendukung pariwisata
- c) Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan, pengembangan jasa dan sarana wisata serta usaha di bidang rumah makanan, catering, minuman, hotel/penginapan dan bar yang mendukung pariwisata
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang dan sarana wisata
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- 6) Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program /kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga.

Fungsi bidang pemuda dan olah raga:

- a) Pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan dan olah raga dengan instansi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah
- b) Pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan dan olah raga
- c) Pembinaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan olah raga
- d) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepemudaan dan olah raga
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olah raga
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut Joko Widodo (2005, h.97) indicator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan /atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, indicator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk melihat atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdiri atas indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

a. Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

b. Indikator Proses (Process)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

c. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik.

d. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

e. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

f. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi

yang ditetapkan. Indikator ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui dampaknya

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable

Dengan diadakannya evaluasi kinerja dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor wisata maka diharapkan terwujudnya suatu keselarasan pembangunan pada bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga . sehingga pada akhirnya mampu memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian kabupaten Ponorogo yaitu terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai macam faktor yang mendukung terhadap proses meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor wisata , adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut yaitu :

1. Input

➤ Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka diperlukan SDA yang berkualitas. Kualitas pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman pegawai.

➤ Sarana Dan Prasarana

Segala jenis peralatan, perlengkapan, kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam melaksanakan pekerjaan.

➤ Potensi Wisata Kabupaten Ponorogo

Dalam pengelolaan PAD tentunya potensi wisata merupakan merupakan komponen utama dalam pengelolaan target PAD pada sektor wisata Kabupaten Ponorogo.

2. Proses

➤ Penetapan Target PAD disektor wisata (Planing)

Pada tahap perencanaan pada bidang pendapatan melakukan perencanaan dengan penetapan target pendapatan asli daerah (PAD).

➤ Koordinasi

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka koordinasi pegawai dan atasan sangat diutamakan. Sehingga tugas dan tanggung jawab suatu organisasi dapat digerakan sebagai suatunesatuan dalam rangka pencapain yang telah ditentukan.

➤ Aksi-aksi yang dilakukan dalam mengelola PAD (Actuating) Aksi (actuating) adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk menapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

➤ Pengawasan dalam pengelolaan PAD (Controlling)

Pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, nilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau tugas, melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan atau sesuai rencana sebagainya.

3. Output

Dengan realisasi PAD maka kinerja pengelolaan potensi wisata dapat di analisis apakah sudah berjalan baik apa belum, semakin tinggi tingkat PAD maka menggambarkan kinerja Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga dalam meningkatkan PAD pada sektor wisata.

H. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah ilmu tentang kinerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoretis mengenai suatu cara/metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. (Dr. Juliansyah Noor, S.E , MM. 2011:22)

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegunaan dari metodologi yaitu untuk menentukan cara ilmiah yang didasar kepada ciri-ciri keilmuan agar suatu penelitian yang di teliti menjadi lebih Rasional, Empiris dan Sistematis.

1. Penentuan daerah penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo Jalan Pramuka No. 19 A Ponorogo, Telp./ fax. (0352) 486012 dengan pertimbangan bahwa hasil dari pengembangan wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada sector wisata di Kabupaten Ponorogo menarik penulis guna melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

2. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam penelitian konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. Burhan Bungin (2001:75)

Selanjutnya jenis kajian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan adalah tehnik analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan analisa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti ,dan dipelajari secara utuh.

3. Informan

Informan di sini adalah sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti dalam kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Dalam penentuan informan di penelitian ini penulis menggunakan Purposive Sampling yaitu dengan cara menetapkan informan yang dianggap tahu atau mempunyai sangkut pautnya dengan masalah secara mendalam tentang persoalan yang ingin diteliti. Oleh sebab itu dalam penelitian ini jumlah informan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

TABEL I
DAFTAR INFORMEN

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | JABATAN |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Drs. Hadi Soenarto, M.Si | L | S2 | Kepala bidang Pemuda dan olah raha Dinas Budparpora |
| 2 | Ir. Mahmud Budihartono, M.Si | L | S2 | Kepala bidang pengembangan Pariwisata Dinas Budparpora |
| 3 | Edi Darwanto, ST | L | S1 | Kasi Obyek dan Daya tarik Dinas Budparpora |
| 4 | H. Purnomo, S.Sos | L | S1 | Kasi Promosi dan informasi Dinas budparpora |
| 5 | Bambang Wibisono, S.Sn | L | S1 | Kepala bidang kebudayaan Dinas Budparpora |
| 6 | Hary Subagyo. ST , MM | L | S2 | Sekretaris Dinas Budparpora |

| | | | | |
|---|--------------|---|-----|------------------------------------|
| 7 | Sukimin | L | SMA | Koordinator Ngembag |
| 8 | Tri Purwanto | L | SMA | Staf pesanggrahan telaga ngebel |

4. Metode pengumpulan data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu terkait suatu masalah yang sedang diteliti sehingga akan dapat diperoleh keterangan terhadap permasalahan suatu hal sehingga dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu dengan jelas sesuai dengan kenyataan yang terjadi. (Juliansyah Nor, 2011 : 138)

a) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan acara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan solusi yang relative lama. (Juliansyah Noor 2011:138-138)

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang obyek melalui suatu metode tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis dan dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.

5. Analisis data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Analisa data kualitatif ini sebagai cara jawaban data terhadap data berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data yang menghasilkan sajian data kemudian diambil kesimpulan. Hal ini dilakukan saling terkait dengan proses pengumpulan data, apabila kesimpulan dirasa kurang kuat maka perlu penelitian kembali dan peneliti mengumpulkan data dari lapangan .

Setelah data terangkum dan terkumpul dilanjutkan dengan analisa data untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisa data dapat dilakukan dengan menyajikan yang bersifat uraian/penjelasan terhadap data yang ada .Analisa kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan permasalahan.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman menggunakan model interaktif yaitu terdiri dari tiga hal utama (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara kegiatan reduks, penyajian,dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian

Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.(Sugiyono 2006:308)

2. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.(Sugiyono 2006:338)

3. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh miles dan huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.(Sugiyono 2006: 341)

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Langkah ke empat dalam analisi data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan nmasih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikembangkan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono 2006:345)

Dari pengertian di atas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan.